



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 48 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.

## Pasal 2

RIPJPID paling sedikit memuat:

- a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
- b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
- c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
- d. tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
- e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
- g. strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
- h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.

### Pasal 3

- (1) RIPJPID dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
  - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### Pasal 4

- (1) RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH;
  - c. BAB III : TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH;
  - d. BAB IV : ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH;
  - e. BAB V : STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH;
  - f. BAB VI : PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH; dan
  - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Uraian RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 17 Oktober 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 17 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN  
2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing suatu daerah. Setiap daerah perlu untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sebagai kebijakan strategis guna memastikan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Sejalan dengan amanat Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, dokumen ini akan menjadi pedoman yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam mendukung pembangunan daerah berbasis IPTEK. Penyusunan rencana ini mengacu pada prioritas pembangunan serta mempertimbangkan rencana induk IPTEK di tingkat provinsi untuk menjamin kesinambungan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah memiliki peran penting dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan daerah. Penyusunan rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga sebagai landasan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang memungkinkan implementasi kebijakan dapat lebih efektif dan akeleratif. Riset sebagai dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan telah dijalankan dengan pendekatan teknokratik yang berlandaskan metode ilmiah. Dengan demikian, tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih terarah melalui penerapan riset dan inovasi yang relevan.

Seiring dengan perubahan dinamika ekonomi dan sosial, transformasi dari penguasaan sumber daya alam menuju penguasaan IPTEK menjadi aspek fundamental dalam menciptakan nilai tambah dan



inovasi berkelanjutan. Kebijakan perencanaan berbasis data menjadi suatu keharusan dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Regulasi nasional seperti UU Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan turunannya menekankan pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Peta Jalan Pemajuan IPTEK harus disusun dengan pendekatan berbasis bukti guna memastikan efektivitas implementasinya.

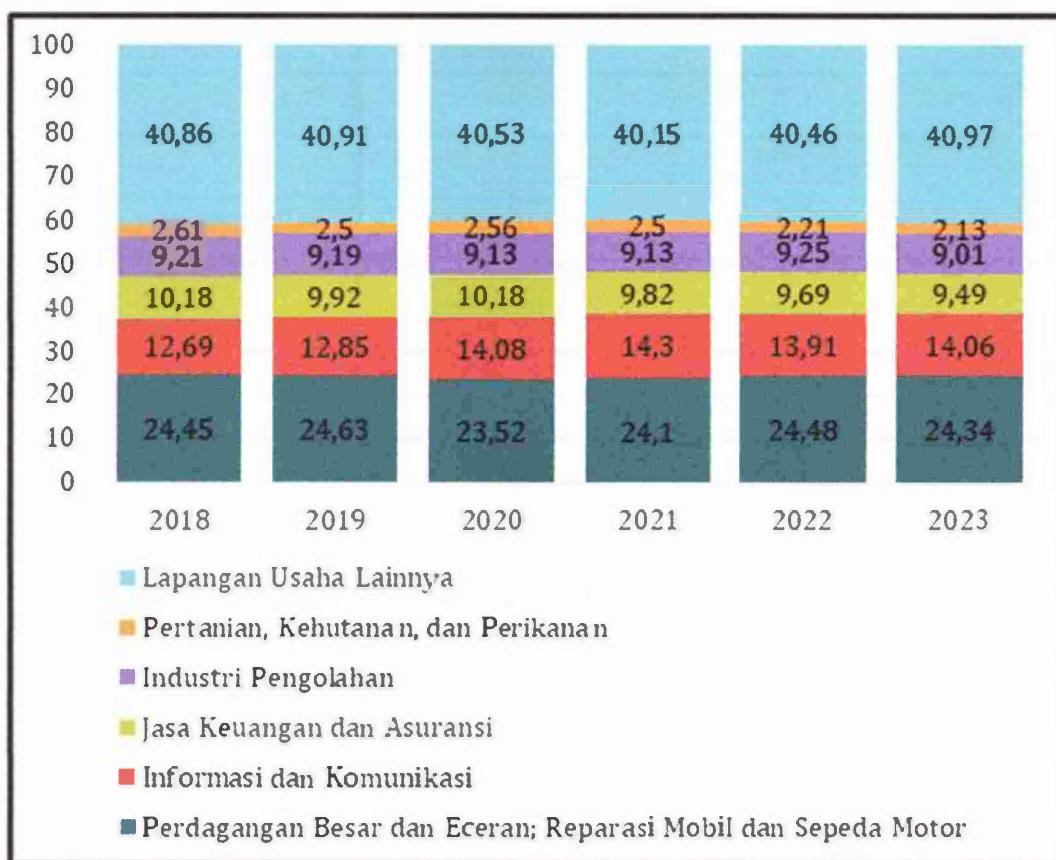
Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada perencanaan berbasis penelitian dan inovasi. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis IPTEK akan menjadikan perencanaan lebih terarah, efisien, dan optimal dalam penggunaan anggaran. Dengan menjadikan riset dan inovasi sebagai landasan kebijakan pembangunan, diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah. Secara lebih lanjut, riset bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan riset bertujuan untuk memperluas hasil penelitian guna menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, penerapan riset mencakup kegiatan alih teknologi, intermediasi teknologi, serta penyebaran dan komersialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pendekatan ini, setiap daerah diharapkan dapat menghadapi tantangan global serta memanfaatkan peluang dalam era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar tengah menyusun Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai bagian dari upaya strategis dalam penguatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi program-program prioritas yang tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, tetapi juga mendukung realisasi janji-janji politik kepala daerah terpilih periode 2025- 2029. Dengan adanya RIPJPID, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Blitar dapat lebih sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemajuan peradaban serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kondisi perekonomian Kota Blitar dapat menjadi gambaran awal dalam penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan

IPTEK Daerah (RIPJPID). Berdasarkan Gambar 1.1, terkait kontribusi sektor terhadap PDRB ADHK Kota Blitar, Struktur ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah dengan persentase di atas 24 persen setiap tahunnya. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sehingga menunjukkan ketahanan dan daya saingnya dalam menghadapi perubahan ekonomi. Selain itu, sektor Industri Pengolahan hingga Informasi dan Komunikasi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Artinya, kedua sektor ini mencerminkan pergeseran ekonomi menuju digitalisasi dan industri berbasis teknologi. Peningkatan signifikan dalam sektor Informasi dan Komunikasi menandakan semakin besarnya peran teknologi dalam mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

**Gambar 1. 1** Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHK Kota Blitar Tahun 2018- 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Secara lebih lanjut strategi dalam rangka memperkuat sektor industri di Kota Blitar, telah ditetapkan beberapa industri unggulan yang menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Blitar, sektor

Industri Makanan, Minuman, dan Tekstil dikategorikan sebagai industri andalan, yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, terdapat industri penunjang dan industri hulu, seperti industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), serta barang anyaman dari bambu dan rotan, yang berperan dalam memperkuat rantai pasok industri kreatif berbasis sumber daya alam. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, juga menjadi bagian dari industri hulu yang dapat mendukung pertumbuhan sektor manufaktur.

Keberhasilan pengembangan industri ini sangat bergantung pada modal dasar yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Selain itu, diperlukan prasyarat utama berupa infrastruktur yang memadai, kebijakan dan regulasi yang adaptif, serta akses terhadap pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis riset dan inovasi harus menjadi strategi utama dalam mendukung transformasi ekonomi daerah. Dengan modernisasi sektor industri melalui pemanfaatan IPTEK, Kota Blitar diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonominya secara lebih efektif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset Dan Inovasi di Daerah Kota Blitar, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Perwali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan tahun 2023 – 2026.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset Dan Inovasi di Daerah Kota Blitar ini adalah agar terciptanya keterpaduan, keberlanjutan dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Dokumen RIPJPID diharapkan juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan riset dan inovasi di Kota Blitar. Sedangkan sasaran dari penyusunan dokumen ini, sebagai berikut:



1. Menganalisis gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kota Blitar;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan peluang riset dan inovasi di Kota Blitar;
3. Menganalisis kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Kota Blitar;
4. Menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di Kota Blitar; dan
5. Menyusun strategi dan rekomendasi peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi di Kota Blitar beserta pengembangannya yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah pengembangan riset dan inovasi di Kota Blitar.

!

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

##### **2.1.1 Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar**

###### **“KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**

“Cerdas” dimaksudkan Kota Blitar menjadi Kota Cerdas yakni cerdas sosial, cerdas ekonomi, cerdas pemerintah daerah, cerdas infrastruktur dan cerdas lingkungan dalam bentuk transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola yang didukung ketahanan lingkungan.

“Inklusif”, pembangunan Kota Blitar dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan seluruh masyarakat. Kesetaraan dan keadilan atas semua sektor pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, pelayanan umum dan juga sektor ekonomi yang meliputi kesempatan berusaha dan kesempatan mendapatkan penghasilan.

“Maju” yaitu selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan

“Berkelanjutan” yaitu baik dari sisi manajemen pemerintahan maupun dari sisi pengelolaan ruang. Dari sisi manajemen pemerintahan berkelanjutan dimaksudkan adanya keberlanjutan manajemen pemerintahan daerah dalam 4 tahapan suksesi. Sedangkan dari sisi pengelolaan ruang adalah pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

##### **2.1.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar**

1. Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing (transformasi sosial);
2. Mengembangkan ekosistem ekonomi dan inovasi Kota Blitar secara berkelanjutan (Transformasi ekonomi);
3. Digitalisasi pelayanan publik Kota Blitar (Transformasi Tata Kelola);
4. Mewujudkan Kota Blitar yang nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya didasari kekuatan religius serta jiwa



- nasionalisme dan patriotisme;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar berkelanjutan, berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi.

#### **2.1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah**

##### **a. Visi Walikota Blitar**

**"KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN"**

##### **b. Misi Walikota Blitar**

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang religius dan nasionalis
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Aman
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis *smart governance*
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang berkelanjutan

#### **2.1.4 Sapta Kriya Walikota Blitar**

1. Menjaga kesinambungan Pembangunan;
2. Mewujudkan sumber daya Manusia yang unggul dan kompetitif;
3. Transformasi ekonomi dan perluasan lapangan kerja;
4. Transformasi sosial berkelanjutan;
5. Keberagaman dan inklusi Blitar SAE;
6. Transformasi Tata Kelola SAE;
7. Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menuju Blitar SAE.

#### **2.1.5 Program Kerja Prioritas**

1. Mendirikan pusat kajian pemikiran dan ajaran Bung Karno;
2. Membumikkan pemikiran dan ajaran Bung Karno ke dalam lembaga pendidikan, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya;
3. Pengelolaan resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural;



4. Pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan
5. Promosi kesehatan bagi kesehatan ibu hamil dan menyusui disertai pemberian asupan gizi
6. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan, dokter dan kader posyandu
7. Menjadikan RSUD Mardi Waluyo sebagai rumah sakit rujukan
8. Pembangunan gedung baru RSUD untuk penambahan jumlah ruang rawat inap, ruang operasi, CATH lab dan pengajuan peningkatan fasilitasi pelayanan kesehatan
9. Pemberian bantuan bagi keluarga pasien rawat inap di RSUD mardi waluyo dan puskesmas sebagai kompensasi pengganti karena meninggalkan pekerjaan, khusus bagi warga Kota Blitar
10. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas peralatan eek kesehatan di posyandu lansia
11. Memfasilitasi pelayanan ambulan gratis untuk penjemputan dan pemulangan pasien/ jenazah yang cepat dan tanggap
12. Meningkatkan bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas dan keluarga tidak mampu.
13. Optimalisasi bantuan beras kesejahteraan daerah (rastrada) dengan bantuan lauk pauk bagi keluarga tidak mampu
14. Memberikan beasiswa sampai sarjana kepada setiap keluarga tidak mampu yang berprestasi
15. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja sosial masyarakat
16. Pelatihan skil kepada generasi milenial, gen z dan pemberdayaan perempuan
17. Pembekalan pendidikan pra nikah dan parenting bagi ibu dalam pola asuh anak
18. Pendampingan dan perlindungan bagi pekerja wanita
19. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur obyek wisata perkotaan
20. Pembangunan dan peningkatan fasilitas umum
21. Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan
22. Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, utilitas umum serta revitalisasi dan optimalisasi aset pemerintah kota Blitar
23. Membuka akses dan koneksi antar wilayah dengan cara:

!

membenahi jalur transportasi (pintu gerbang Tol menghadap Kota)

24. Normalisasi drainase perkotaan, normalisasi sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan sanitasi perkotaan
25. Menyediakan hunian murah untuk mengurai kepadatan penduduk dan rehab rumah tidak layak huni
26. Pembangunan Rusunawa dan Rumah layak huni Perkotaan
27. Pembangunan Hunian Perumahan PNS, karyawan BUMN/BUMD dan karyawan swasta
28. Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru
29. Memfasilitasi pengelolaan limbah berbasis masyarakat
30. Memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pemerintahan guna transparansi dan akuntabilitas
31. Pengembangan pusat perijinan dan layanan jasa kota melalui optimalisasi plaza pelayanan publik
32. Pelayanan publik bebas pungli
33. Optimalisasi program RT Keren menjadi RT SAE dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat
34. Menyediakan cctv di tempat. Strategis dan setiap RT terintegrasi
35. Sarapan bareng walikota Blitar sebagai sarana pelatihan *life skill* bagi masyarakat Kota Blitar
36. Bekerjasama dengan lembaga profesional dalam melaksanakan penilaian dan pengawasan kinerja pemerintah daerah
37. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Service
38. Lelang jabatan untuk seluruh posisi eselon 2
39. Menanamkan *mindset* dan meningkatkan kapasitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat yang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi
40. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward and punishment*
41. Perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
42. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan berbasis budi pekerti luhur, kerifan lokal, kewirausahaan, bahasa asing, dan potensi daerah sehingga menghasilkan lulusan berdaya saing



43. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan
44. Penyediaan dan bantuan untuk TPQ, madrasah diniyah, pesantren, sekolah minggu, dan lainnya, serta meningkatkan SDM dan kesejahteraan tenaga pendidiknya
45. Pembangunan sekolah dan revitalisasi sekolah
46. Penguatan program pendidikan sekolah gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs warga Kota Blitar dan pemberian fasilitas penunjang pendidikan meliputi: seragam sekolah, sepatu, kaos kaki, tas, dan kaos olahraga
47. Menyediakan fasilitas belajar mengajar berbasis IT
48. Memberikan bantuan penunjang pendidikan dan fasilitasi bimbingan belajar masuk perguruan tinggi bagi siswa SMA/SMK/MA warga Kota Blitar
49. Melaksanakan even-even olimpiade ilmu pengetahuan di Kota Blitar
50. Mengembangkan budaya akademik di Kota Blitar melibatkan perguruan tinggi
51. Meningkatkan pembinaan, apresiasi, dan penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga guna menggal potensi dan prestasi
52. Pembangunan Fasilitas Olahraga (Relokasi Stadion Supriyadi, dan Pengembangan *Sport center*)
53. Menjalin hubungan kemitraan dengan negara dan kota di luar negeri yang memiliki hubungan kesejarahan dengan Bung Karno
54. Menumbuhkembangkan kreativitas kebudayaan berupa pembinaan, bantuan peralatan, optimalisasi pusat kesenian, dan penyelenggaraan even-even seni budaya
55. Membangun Pasar Agro, Pasar Induk, dan Pergudangan sebagai pusat perdagangan pasar grosir dan revitalisasi pasar
56. Pembangunan Pusat Ekonomi Perdagangan (*Blitar Trade Center*)
57. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha
58. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Kota Blitar ke dalam dan luar negeri
59. Membangun pasar ekonomi kreatif dengan memberi ruang kreasi kepada milenial dan perempuan dalam bidang IT, kuliner, kriya, fashion, dan potensi lainnya

?

60. Menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah
61. Pengelolaan tata niaga produk pertanian dan UMKM melalui BUMD
62. Membuka industri baru dan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi dan membuka pabrik (produksi) sehingga dapat menyerap tenaga kerja
63. Membentuk BUMD baru guna menangani kegiatan bidang usaha baru dalam satu wadah multi usaha
64. Bantuan peralatan dan fasilitas pendukung di bidang pertanian
65. Memfasilitasi dan mendampingi pertanian model *urban farming* dan pola tanam organik
66. Memberikan kemudahan perijinan usaha mikro, kecil, dan menengah
67. Makam Bung Karno sebagai Destinasi Wisata Utama Kota Blitar berskala internasional
68. Menyelenggarakan bursa kerja bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi bekerja sama dengan pelaku usaha
69. Membangun Kerjasama dengan pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja warga Kota Blitar

#### **2.1.6 Program Prioritas Walikota**

1. Pembangunan BTC (*Blitar Trade Center*)
2. Pembangunan Stadion
3. Pengembangan *Sport Center*
4. TPST Regional
5. Revitalisasi Pasar Agro/Induk
6. Pembangunan Rusunawa
7. Pembentukan BUMD baru
8. Pengembangan dan Pembangunan RSUD
9. Akses pendekat JLS dan Jalan Tol

!

## 2.2 Aspek Geografi

Aspek geografi Kota Blitar dapat ditinjau berdasarkan luas wilayah yang mencerminkan distribusi geografis antar-kelurahan. Berdasarkan tabel 2.1, terkait luas wilayah di Kota Blitar, dapat diketahui terdapat tiga kecamatan utama, yaitu Kepanjenkidul, Sukorejo, dan Sananwetan. Berdasarkan data, total luas wilayah Kota Blitar mencapai 33,203 km<sup>2</sup>, dengan distribusi wilayah yang bervariasi di setiap kelurahan. Kecamatan Sananwetan memiliki beberapa kelurahan dengan luas wilayah yang relatif besar, seperti Gedog (2,95 km<sup>2</sup>), Sananwetan (2,154 km<sup>2</sup>), dan Bendogerit (2,055 km<sup>2</sup>). Sementara itu, Kecamatan Sukorejo juga memiliki kelurahan dengan luas yang cukup besar, seperti Pakunden (2,31 km<sup>2</sup>) dan Tanjungsari (2,604 km<sup>2</sup>). Di sisi lain, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki luas wilayah yang lebih beragam, dengan kelurahan seperti Tanggung (2,449 km<sup>2</sup>) dan Sentul (2,287 km<sup>2</sup>) yang lebih luas dibandingkan kelurahan lain dalam kecamatan yang sama.

Distribusi luas wilayah ini berimplikasi terhadap perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya, serta penyediaan infrastruktur di setiap wilayah. Wilayah dengan luas lebih besar cenderung memiliki potensi untuk pengembangan kawasan pemukiman, industri, serta fasilitas publik yang lebih luas, sementara wilayah dengan luas lebih kecil mungkin memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan membutuhkan optimalisasi tata ruang yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek geografis ini sangat penting dalam menyusun strategi pembangunan yang berbasis data dan kondisi faktual di Kota Blitar.

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Blitar**

NO	KELURAHAN	KODE	KECAMATAN	LUAS ( KM2)
1	Kepanjenkidul	35.72.01.1001	Kepanjenkidul	1,043
2	Ngadirejo	35.72.01.1002	Kepanjenkidul	1,928
3	Sentul	35.72.01.1003	Kepanjenkidul	2,287
4	Kauman	35.72.01.1004	Kepanjenkidul	0,765
5	Tanggung	35.72.01.1005	Kepanjenkidul	2,449
6	Bendo	35.72.01.1006	Kepanjenkidul	1,254
7	Kepanjenlor	35.72.01.1007	Kepanjenkidul	0,7
8	Pakunden	35.72.02.1001	Sukorejo	2,31
9	Blitar	35.72.02.1002	Sukorejo	1,448
10	Tlumpu	35.72.02.1003	Sukorejo	1,081
11	Turi	35.72.02.1004	Sukorejo	0,438
12	Karangsari	35.72.02.1005	Sukorejo	0,863
13	Sukorejo	35.72.02.1006	Sukorejo	1,384
14	Tanjungsari	35.72.02.1007	Sukorejo	2,604
15	Gedog	35.72.03.1001	Sananwetan	2,95
16	Plosokerep	35.72.03.1002	Sananwetan	1,164
17	Klampok	35.72.03.1003	Sananwetan	1,557
18	Sananwetan	35.72.03.1004	Sananwetan	2,154
19	Rembang	35.72.03.1005	Sananwetan	0,869
20	Karangtengah	35.72.03.1006	Sananwetan	1,899
21	Bendogerit	35.72.03.1007	Sananwetan	2,055
JUMLAH				33,203

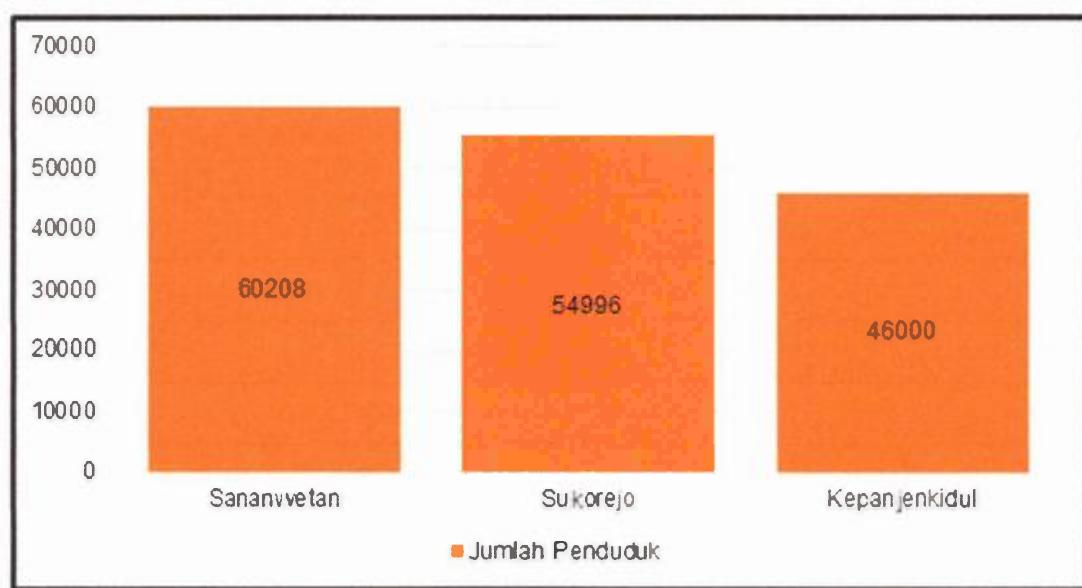
Sumber: Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar



### 2.3 Kependudukan

Pada aspek kependudukan, gambaran umum Kota Blitar dapat diketahui berdasarkan data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Blitar dan jumlah penduduk menurut kelompok umur hingga jenis kelamin. Data pada gambar 2.1, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Blitar tersebar di tiga kecamatan utama, yaitu Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan, dengan Kecamatan Sananwetan memiliki jumlah penduduk tertinggi, yakni 60.208 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Sukorejo dengan 54.996 jiwa, dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 46.000 jiwa. Selain itu, terdapat variasi dalam laju pertumbuhan penduduk, Kecamatan Sananwetan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,56 persen, disusul oleh Sukorejo sebesar 0,44 persen, dan Kepanjenkidul sebesar 0,32 persen.

**Gambar 2. 1** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Blitar tahun 2024



Sumber: Kota Blitar dalam Angka 2025

Selanjutnya, dapat diketahui terkait data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Blitar tahun 2024 (Tabel 2.2), total populasi mencapai 161.204 jiwa, dengan komposisi 80.376 jiwa laki-laki dan 80.828 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun selisihnya relatif kecil. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur juga menunjukkan variasi yang mencerminkan struktur demografi di Kota Blitar. Kelompok usia 10–14 tahun dan 40–44 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar, masing-masing sebanyak 13.088 jiwa dan 13.784 jiwa, yang menunjukkan dominasi populasi usia sekolah serta angkatan kerja produktif. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit, dengan kelompok 75

tahun ke atas berjumlah 3.783 jiwa, mengindikasikan adanya proporsi penduduk lanjut usia yang tetap signifikan dalam perencanaan kebijakan sosial dan layanan kesehatan.

**Tabel 2. 2** Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Blitar Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	4.928	4.565	9.493
5–9	6.035	5.774	11.809
10–14	6.788	6.300	13.088
15–19	6.756	6.236	12.992
20–24	6.562	6.300	12.862
25–29	6.351	6.225	12.576
30–34	5.541	5.778	11.319
35–39	5.753	5.893	11.646
40–44	6.966	6.818	13.784
45–49	5.826	5.701	11.527
50–54	5.169	5.240	10.409
55–59	4.492	4.932	9.424
60–64	3.385	4.049	7.434
65–69	2.622	2.874	5.496
70–74	1.659	1.903	3.562
75+	1.543	2.240	3.783
Total	80.376	80.828	161.204

Sumber: Kota Blitar dalam Angka 2025

Komposisi penduduk berdasarkan usia memiliki implikasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Keberadaan kelompok usia produktif yang besar memerlukan strategi optimalisasi tenaga kerja dan penguatan sektor ekonomi berbasis IPTEK untuk mendukung pertumbuhan daerah. Di sisi lain, tingginya jumlah penduduk lanjut usia menuntut peningkatan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta kebijakan kesejahteraan yang lebih inklusif. Dengan demikian, analisis struktur kependudukan ini menjadi dasar yang krusial dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kondisi demografi Kota Blitar.

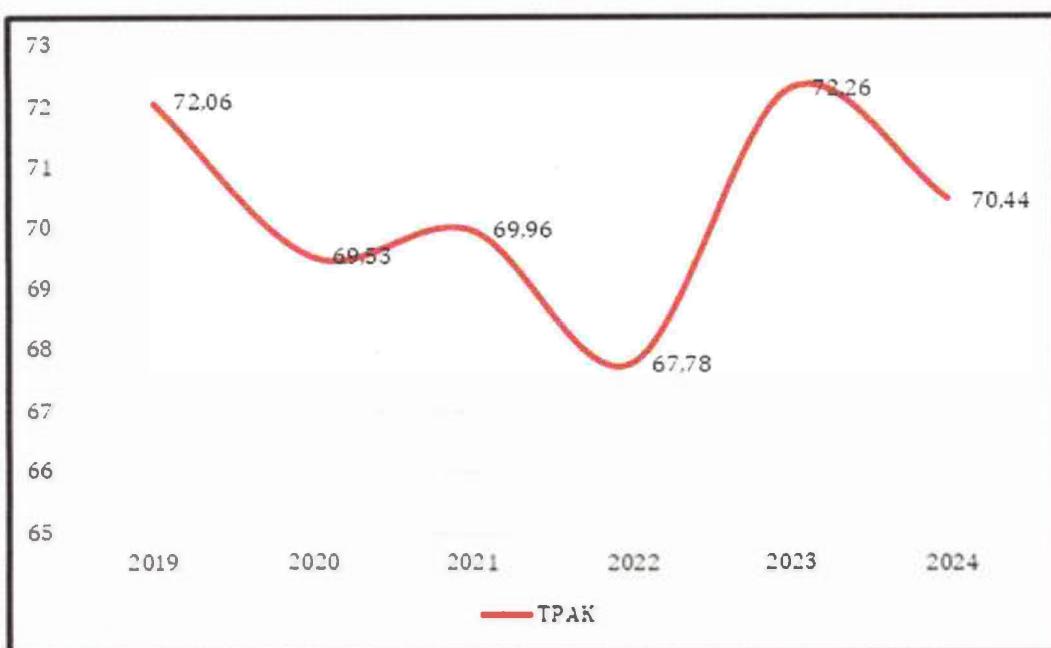


#### 2.4 Ketenagakerjaan

Pada aspek ketenagakerjaan, gambaran umum Kota Blitar dapat dilihat berdasarkan data tingkat partisipasi Angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka, yang menjadi indikator utama dalam memahami kondisi pasar tenaga kerja di daerah ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, sementara tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persentase penduduk yang belum memperoleh pekerjaan meskipun secara aktif mencari kerja. Analisis terhadap kedua indikator ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, seperti peningkatan akses terhadap pelatihan vokasi, pengembangan sektor ekonomi berbasis IPTEK, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Blitar selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja. Berdasarkan gambar 2.2, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, TPAK tercatat sebesar 72,06 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 69,53 persen, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Pada tahun 2021, TPAK mengalami sedikit peningkatan menjadi 69,96 persen, sebelum kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 67,78 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil pasca-pandemi. Namun, pada tahun 2023, TPAK mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 73,26 persen, yang mengindikasikan perbaikan ekonomi dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor. Tren ini kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 70,44 persen, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi atau ketimpangan antara pertumbuhan lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja.

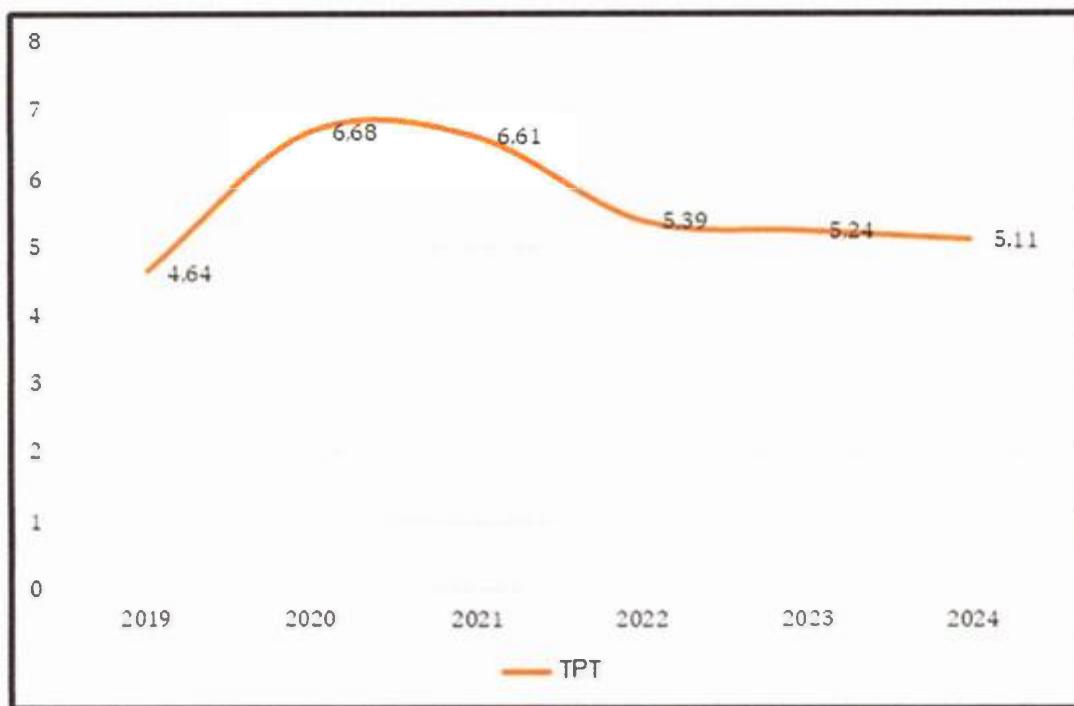
**Gambar 2. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar tahun 2019-2024**



Sumber: Kota Blitar dalam Angka 2025

Hingga saat ini, permasalahan dalam aspek ketenagakerjaan yang masih dialami oleh Kota Blitar adalah pengangguran. Berdasarkan gambar 2.3 terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Blitar selama periode 2019–2024, dapat diketahui bahwa cenderung fluktuatif sehingga mencerminkan dinamika ketenagakerjaan dan kondisi ekonomi daerah. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 4,64 persen, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 6,68 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan menjadi 6,61 persen, menunjukkan awal pemulihan ekonomi, meskipun tingkat pengangguran masih relatif tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan penurunan TPT menjadi 5,39 persen dan pada tahun 2023 semakin membaik dengan angka 5,24 persen, artinya mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2024, TPT kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 5,11 persen, yang menunjukkan upaya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja mulai menunjukkan hasil yang positif. Secara lebih lanjut, selama tiga tahun terakhir terdapat tren penurunan tingkat pengangguran terbuka, tetapi angka tersebut masih cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Oleh karena itu, hingga saat ini masih dibutuhkan strategi akselerasi penurunan tingkat pengangguran di Kota Blitar.

**Gambar 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar 2019-2024**



Sumber: Kota Blitar dalam Angka 2025

## 2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan (Gini Rasio), dan tingkat kemiskinan. Ketiga indikator ini saling berkaitan dalam memberikan gambaran mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional selama periode 2019–2024, Gambar 2.4 menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan akibat dinamika ekonomi global dan domestik.

**Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2024**



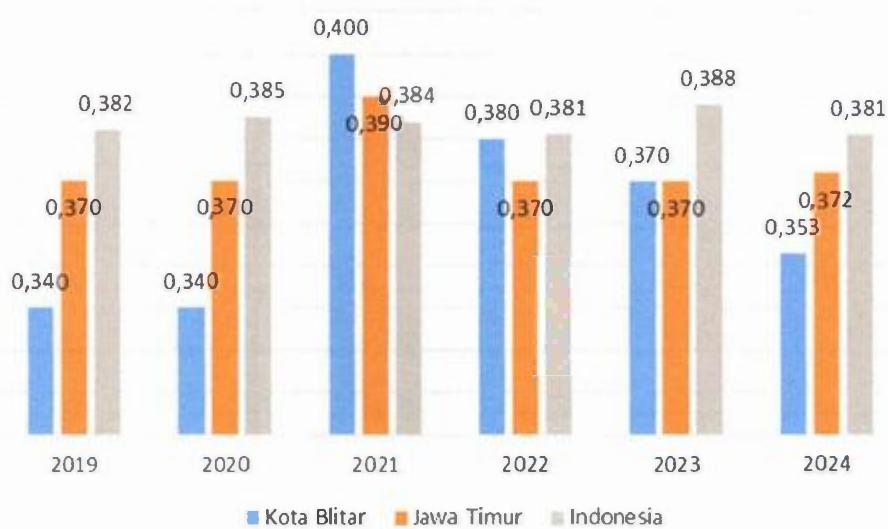
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada tahun 2019, Kota Blitar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (5,53%) dan nasional (5,02%). Namun, pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup tajam, di mana pertumbuhan Kota Blitar terkontraksi menjadi -2,28%, lebih rendah dari Jawa Timur (-2,07%) dan nasional (-2,23%).

Setelah mengalami kontraksi, ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,21%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (3,56%) dan nasional (3,70%). Pemulihan semakin solid pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,22%, mendekati angka pertumbuhan Jawa Timur (5,34%) dan nasional (5,31%). Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tetap stabil masing-masing sebesar 5,29% dan 5,33%, menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah kembali ke jalur pemulihan yang kuat dan mampu mempertahankan pertumbuhan yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional.

Gini rasio merupakan indikator yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Pada periode 2019–2024, Gini Rasio Kota Blitar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan Jawa Timur dan nasional, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih kecil di Kota Blitar. Hal ini dapat di lihat pada Gambar 2.6 di bawah ini.

**Gambar 2. 6** Perkembangan Gini Rasio Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024



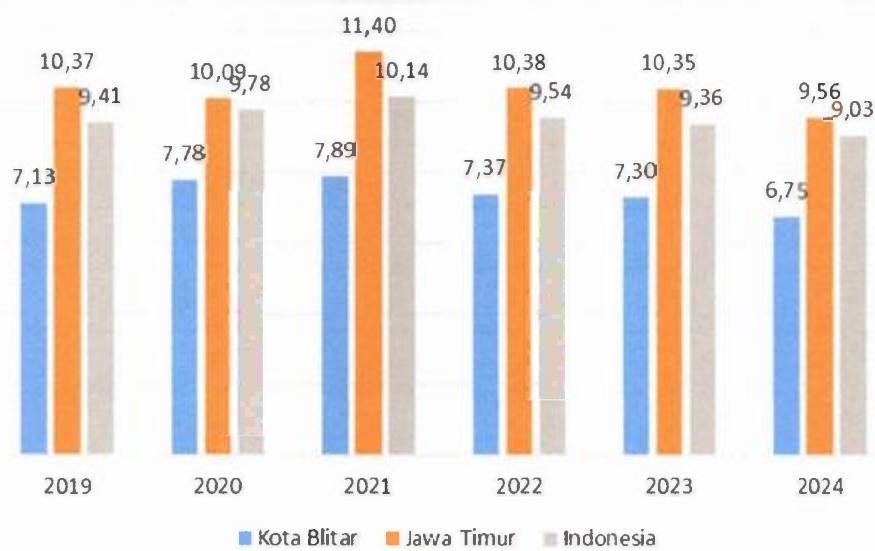
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada tahun 2019 dan 2020, Gini Rasio Kota Blitar berada pada angka 0,34, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (0,37) dan nasional (0,382–0,385). Pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan Gini Rasio Kota Blitar

menjadi 0,40, sementara Jawa Timur berada di angka 0,39 dan nasional 0,384. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi mulai pulih setelah pandemi, terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2022 dan 2023, Gini Rasio Kota Blitar kembali turun menjadi 0,38 dan 0,37, mendekati angka provinsi dan nasional. Namun, pada tahun 2024, angka Gini Rasio Kota Blitar menurun menjadi 0,353, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (0,372) dan nasional (0,381), yang menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan serta keberhasilan kebijakan pemerataan ekonomi.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2019–2024, tingkat kemiskinan di Kota Blitar cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional, namun masih mengalami fluktuasi akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil.

**Gambar 2. 7** Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kota Blitar tercatat sebesar 7,13%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (10,37%) dan nasional (9,41%). Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan menjadi 7,78%, sejalan dengan peningkatan di Jawa Timur (10,09%) dan nasional (9,78%). Puncak kenaikan terjadi pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan Kota Blitar mencapai 7,89%, sementara Jawa Timur melonjak ke 11,40% dan nasional 10,14%, mencerminkan dampak krisis ekonomi yang signifikan pada masyarakat miskin.

Seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan Kota Blitar mulai menurun menjadi 7,37% pada tahun 2022 dan 7,30% pada tahun 2023, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Namun,

pada tahun 2024, tingkat kemiskinan turun cukup signifikan menjadi 6,75%, menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dibandingkan dengan Jawa Timur (9,56%) dan nasional (9,03%), Kota Blitar tetap memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, yang mencerminkan efektivitas kebijakan sosial dan program bantuan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

## 2.6 Usulan Produk Unggulan

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kota Blitar, salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang berbasis riset dan inovasi. PUD merupakan sektor strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan akselerasi pembangunan berkelanjutan. Upaya pengembangan PUD di Kota Blitar bertujuan untuk mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal dan memperkuat posisi Kota Blitar dalam rantai nilai industri regional maupun nasional. Selain itu, RIPJPID juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah, seperti rendahnya produktivitas industri kreatif, keterbatasan teknologi produksi, akses pasar yang masih terbatas, serta tantangan dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk.

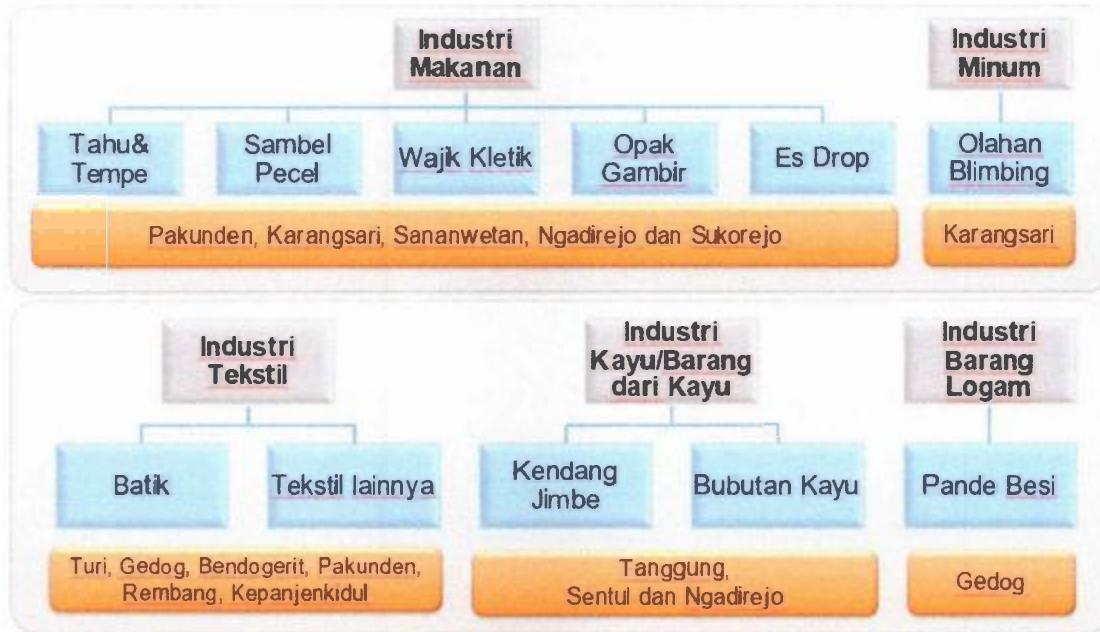
Berdasarkan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Kota Blitar 2024-2045, terdapat beberapa kategori industri unggulan yang menjadi fokus pengembangan, yaitu industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu/barang dari kayu, serta industri barang logam. Pada sektor industri makanan, beberapa produk unggulan yang telah diidentifikasi meliputi tahu & tempe, sambel pecel, wajik kletik, opak gambir, dan es drop, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Pakunden, Karangsari, Sananwetan, Ngadirejo, dan Sukorejo. Sementara itu, industri minuman menonjolkan produk olahan belimbing, yang menjadi ikon khas dari wilayah Karangsari.

Di sektor industri tekstil, Kota Blitar memiliki batik dan tekstil lainnya sebagai produk unggulan, yang banyak diproduksi di Turi, Gedog, Bendogerit, Pakunden, Rembang, dan Kepanjenkidul. Industri kayu dan barang dari kayu juga menjadi salah satu sektor potensial, dengan kendang jimbé dan bubutan kayu sebagai produk utama yang berkembang di Tanggung, Sentul, dan Ngadirejo. Adapun di sektor industri barang logam,



pande besi di Gedog menjadi salah satu subsektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

**Gambar 2. 8** Gambaran Produk Unggulan Kota Blitar



Sumber: Rancangan RPIK Kota Blitar 2024 - 2045

Selain mengacu pada RPIK Kota Blitar, pengembangan industri unggulan daerah juga diselaraskan dengan Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur 2019-2039, yang mengidentifikasi industri kayu, barang dari kayu, rotan furnitur, dan kerajinan dari tanaman sebagai sektor prioritas. Produk-produk dalam kategori ini mencakup kendang Bung Karno, kerajinan kayu, kerajinan batik, dan batik kayu, yang memiliki keterkaitan erat dengan industri kreatif berbasis budaya lokal. Di sisi lain, industri makanan dalam RPIP Jawa Timur menyoroti produk seperti koyah, opak gambir, kue kering, olahan belimbing, serta produk berbasis buah lainnya, yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan berbasis inovasi dan diversifikasi produk.

**Gambar 2. 9** Gambaran Produk berbasis Inovasi dan Diversifikasi



Sumber: RPIP Provinsi Jawa Timur 2019-2039

Maka, berdasarkan literatur tersebut diatas produk unggulan daerah (PUD) Kota Blitar yang dijadikan fokus pengembangan dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) yaitu (i) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya meliputi Kendang Jimbe maupun Souvenir bertemakan Soekarno dan Industri Makanan dan Minuman utamanya yang bersumber dari Belimbing. Berikut merupakan analisis kekuatan dan kelemahan dari masing – masing produk unggulan daerah (PUD) yaitu:

### 1. Belimbing

**Tabel 2. 3** Analisis SWOT PUD Belimbing

Strength (Kekuatan)	a. Merupakan produk khas Kota Blitar b. Bahan Baku berada di Kota Blitar c. Sudah memiliki kawasan khusus
Weakness (Kelemahan)	a. Kualitas Produk belum memenuhi standar Grade A
Opportunity (Peluang)	a. Sudah ditetapkan sebagai industri unggulan di RPIK b. Sudah dikaji secara singkat oleh BRIN sebagai potensi produk unggulan c. Sudah memiliki permintaan pasar
Threat (Ancaman)	a. Produk serupa dari daerah lain dengan kualitas dan kapasitas lebih baik

Sumber : Analisa Tim, 2025

## 2. Kendang Jimbe

**Tabel 2. 4** Analisis SWOT PUD Kendang Jimbe

Strength (Kekuatan)	a. Merupakan Produk Daerah
Weakness (Kelemahan)	a. Belum Memiliki Pola Khas
Opportunity (Peluang)	a. Sudah Memiliki Permintaan Pasar Dalam dan Luar Negeri b. Sudah ditetapkan sebagai produk dari Industri Unggulan dalam RPIK
Threat (Ancaman)	a. Produk serupa dari daerah lain b. Bahan Baku masih berasal dari luar daerah c. Kawasan Produksi bercampur dengan pemukiman

Sumber : Analisa Tim, 2025

## 3. Souvenir Soekarno

**Tabel 2. 5** Analisis SWOT PUD Souvenir Soekarno

Strength (Kekuatan)	a. Memiliki citra yang kuat dan dikenal luas b. Memiliki citra yang melekat dengan Kota Blitar
Weakness (Kelemahan)	a. Kualitas Produk belum memiliki standar
Opportunity (Peluang)	a. Sudah Memiliki Permintaan Pasar b. Pemasaran bisa sejalan selaras dengan citra kota
Threat (Ancaman)	a. Ulasan Konsumen yang Kurang Baik

Sumber : Analisa Tim, 2025

## 2.7 Usulan Permasalahan Utama Daerah

Dalam dokumen Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029 berbagai permasalahan utama daerah telah diidentifikasi sebagai tantangan strategis yang memerlukan solusi berbasis kebijakan, riset, dan inovasi daerah.

Permasalahan yang dihadapi mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan, yang menjadi faktor determinan dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Pada aspek ekonomi, permasalahan yang menonjol meliputi upaya meningkatkan daya saing Kota Blitar di tingkat provinsi maupun nasional, yang erat kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemandirian fiskal daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar perlu diarahkan agar lebih inklusif dan berkelanjutan, salah satunya dengan mendorong usaha dan produksi lokal agar dapat naik kelas hingga ke pasar regional dan nasional. Dua kutub pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya juga menjadi perhatian, yang memerlukan perencanaan strategis untuk memastikan bahwa seluruh wilayah dapat menikmati pertumbuhan yang merata.

**Gambar 2. 9** Permasalahan dan Isu Strategis



Sumber: Rancangan Teknokratis RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui penciptaan lapangan kerja produktif serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Keberlanjutan sektor ekonomi kreatif juga menjadi prioritas, dengan upaya meningkatkan produktivitas sektor ekonomi kreatif serta mendorong penguatan pariwisata berbasis wisata kebangsaan. Di sisi lain, permasalahan terkait pelayanan pemerintahan yang terintegrasi satu atap serta penyediaan data yang akurat dan terpusat dalam konsep "Satu Data" menjadi elemen penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dari perspektif tata ruang dan infrastruktur, penciptaan wilayah yang aman dan kondusif, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta bangunan gedung menjadi prioritas utama guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek sosial, perhatian juga diberikan pada perlindungan masyarakat dan peningkatan layanan dasar, seperti pelayanan sanitasi, air minum, dan penanganan sampah. Selain itu, antisipasi terhadap bencana dan upaya meminimalkan degradasi



lingkungan menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang harus diterapkan dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, permasalahan utama yang dihadapi Kota Blitar mencerminkan kompleksitas dalam membangun kota yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi pembangunan yang disusun dalam RPJMD 2025-2029 perlu mengedepankan pendekatan berbasis riset dan inovasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah yang terencana dan terukur, Kota Blitar dapat menghadapi tantangan pembangunan dengan lebih efektif dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



## BAB III

### TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini membahas secara komprehensif berbagai tantangan dan peluang strategis yang berperan krusial dalam optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi, serta menguraikan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ditargetkan untuk dicapai dalam lima tahun ke depan.

#### 3.1 Tantangan Riset dan Inovasi

Dalam lima tahun ke depan, pemanfaatan riset dan inovasi di Kota Blitar akan dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis yang bersifat struktural, kultural, dan teknologis. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program dalam RIPJPID dapat menjawab kebutuhan nyata daerah serta memperkuat daya saing lokal secara berkelanjutan. Secara lebih lanjut, berikut merupakan tantangan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang yang dihadapi oleh Kota Blitar.

##### 1. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)

Masih rendahnya jumlah peneliti, minimnya pelatihan berbasis riset, serta kurangnya regenerasi inovator lokal menyebabkan ekosistem inovasi belum berkembang optimal.

##### 2. Belum memadainya infrastruktur riset dan pusat inovasi

Seperti laboratorium pengembangan produk, inkubator bisnis, serta showroom promosi hasil inovasi. Akses terhadap fasilitas ini masih terpusat dan belum merata di seluruh wilayah Kota Blitar, sehingga pelaku usaha kecil dan masyarakat umum sulit mengakses manfaat langsung dari riset dan inovasi.

##### 3. Penguatan perlindungan kekayaan intelektual (HKI) dan pemanfaatan hasil riset.

Rendahnya literasi HKI dan minimnya upaya komersialisasi produk hasil riset menyebabkan potensi inovasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

##### 4. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya integrasi antar lembaga

Kurangnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah serta belum adanya sistem data dan informasi yang terintegrasi menjadikan perencanaan program riset cenderung bersifat sektoral dan tumpang tindih.



## 5. Tantangan adaptasi terhadap dinamika global, termasuk isu lingkungan, ekonomi hijau, dan transformasi digital.

Kota Blitar perlu meningkatkan kemampuan adaptif terhadap perubahan tersebut dengan cara mendorong riset yang responsif terhadap tren global dan memperluas jejaring kerja sama internasional, termasuk untuk pembiayaan inovasi dan pertukaran pengetahuan.

### 3.2 Peluang Riset dan Inovasi

Kota Blitar memiliki peluang strategis yang besar dalam memanfaatkan riset dan inovasi sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang ini bersumber dari kekuatan lokal, perkembangan teknologi, serta dukungan regulasi nasional yang mendorong penguatan ekosistem inovasi di daerah.

#### 1. Produk unggulan berbasis sumber daya lokal

Produk Unggulan tersebut seperti Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya meliputi Kendang Jimbe maupun Bubutan Kayu , Industri Makanan dan Minuman utamanya yang bersumber dari Belimbing dan Souvenir bertemakan Soekarno, menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui riset desain, teknologi produksi, dan model bisnis digital. Potensi ini dapat dioptimalkan untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan memperluas pasar, termasuk melalui pengembangan klaster inovasi daerah.

#### 2. Dukungan regulasi

Dukungan Regulasi dari pemerintah pusat, membuka ruang bagi daerah untuk menyusun kebijakan riset dan inovasi secara mandiri dan partisipatif. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan model kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal Kota Blitar.

#### 3. Kemajuan teknologi digital

Kemajuan Teknologi Digital memberikan peluang besar dalam mendukung digitalisasi layanan publik, efisiensi proses produksi UMKM, serta integrasi data riset dan inovasi. Pemanfaatan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan platform *e-government* dapat mempercepat adopsi inovasi serta memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



#### **4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya inovasi mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif. Hal ini memberikan peluang untuk membangun kolaborasi antar pelaku inovasi melalui skema inkubasi, pelatihan keterampilan, dan forum diseminasi hasil riset. Peran komunitas kreatif lokal dan kampus di sekitar Kota Blitar juga dapat dioptimalkan sebagai mitra inovatif.

#### **5. Peluang Kerjasama antar Daerah**

Peluang kerja sama antar daerah hingga internasional semakin terbuka dengan meningkatnya akses terhadap jejaring riset global dan kemitraan ekspor.



## BAB IV

### ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Analisis kesenjangan ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan (gap) yang ada antara kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di daerah, baik tentang produk-produk unggulan daerah maupun permasalahan-permasalahan utama daerah, dibandingkan dengan kondisi akhir yang diharapkan. Kesenjangan diisi dengan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, sebagai dasar penentuan program indikatif yang akan dibuat.

**Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi**

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat Ini/Awal	Kondisi yang Diharapkan/Akhir	Kesenjangan
<b>Produk Unggulan Daerah</b>			
<b>Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Sebagian responden mengetahui reformasi, namun belum menyeluruh	Mayoritas stakeholder memahami arah reformasi kebijakan	Belum semua pihak memahami urgensi reformasi
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Data pelaku usaha belum terintegrasi dan masih tersebar	Tersedianya basis data digital pelaku dan potensi usaha	Tidak adanya platform data terintegrasi
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Fasilitas produksi dan riset masih terbatas	Fasilitas riset dan produksi tersedia dan merata	Keterbatasan infrastruktur menghambat hilirisasi
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Belum tersedia anggaran khusus untuk Pengembangan industri kayu	Adanya anggaran rutin untuk riset industri kreatif	Ketiadaan alokasi anggaran khusus



Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Jumlah produkyang memiliki perlindungan HKI masih minim	Produk unggulan dilindungi secara hukum melalui HKI	HKI belum jadi prioritas pelaku UMKM
<b>Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi</b>			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas belum optimal	Terbangunnya kemitraan lintas sektor dalam inovasi	Masih rendahnya partisipasi komunitas dan swasta
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Fasilitas pelatihan dan showroom belum merata	Tersedianya fasilitas pelatihan dan promosi yang representatif	Sarana belum memenuhi standar pelatihan modern
<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>			
Peningkatan difusi inovasi;	Desain inovatif belum terdokumentasi dan disebarluaskan	Desain dan teknologi kerajinan tersebar luas	Kreativitas belum diorganisasi secara sistematis
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Penerapan hasil riset oleh UMKM masih rendah	Riset diterapkan oleh UMKM secara berkelanjutan	Rendahnya adopsi teknologi hasil riset
<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>			
Promosi dan kampanye inovasi;	Promosi inovasi belum terjadwal secara rutin	Promosi dilakukan berkaladan terstruktur	Minimnya agenda promosi inovasi secara resmi
Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan kepada inovator masih terbatas	Penghargaan diberikan secara berkala oleh pemerintah	Tidak adanya sistem penghargaan inovator

!

Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup kerajinan sangat sedikit	Meningkatnya jumlah startup berbasis riset	Dukungan inkubasi belum berjalan optimal
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Dokumentasi pengetahuan lokal masih lemah	Pengetahuan lokal terdokumentasi dan dilindungi	Ketidakhadiran sistem dokumentasi pengetahuan
<b>Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah</b>			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Pengembangan riset belum berbasis kebutuhan daerah	Riset diarahkan sesuai kebutuhan pengrajin lokal	Kebijakan belum menyasar kebutuhan real lapangan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi belum terbentuk secara konsisten	Klaster inovasi aktif dan didukung kebijakan	Konektivitas antar pelaku belum terbentuk kuat
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Koordinasi masih sektoral dan belum harmonis	Sinergi pusat dan daerah dalam satu platform	Kebijakan antar level belum sinkron
<b>Penyelarasan dengan perkembangan global</b>			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Kepedulian terhadap isu keberlanjutan bahan baku masih rendah	Isu keberlanjutan jadi bagian strategi daerah	Kurangnya perhatian terhadap praktik berkelanjutan

?

Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional masih sangat terbatas	Adanya kerja sama luar negeri untuk ekspor dan pelatihan	Terbatasnya akses jejaring luar negeri
<b>Permasalahan Utama Daerah</b>			
<b>Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Sebagian besar responden belum mengetahui arah kebijakan integrasi layanan	Mayoritas pemangku kepentingan memahami arah reformasi kebijakan layanan	Rendahnya literasi reformasi di kalangan aparatur dan masyarakat
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Data pelayanan publik masih tersebar di berbagai instansi	Tersedianya sistem basis data terintegrasi dan dapat diakses lintas OPD	Belum ada sistem integrasi dan interoperabilitas data layanan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Belum meratanya layanan satu atap dan sistem informasi pendukung	Infrastruktur layanan satu atap tersedia di setiap kecamatan	Kurangnya komitmen dalam pemerataan infrastruktur layanan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Tidak terdapat anggaran khusus untuk integrasi digital layanan	Adanya anggaran tahunan untuk pengembangan digital layanan publik	Tidak ada penganggaran khusus untuk inovasi layanan digital
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Belum semua layanan memiliki perlindungan data digital	Seluruh layanan publik dilengkapi dengan perlindungan data dan sistem keamanan	Perlindungan data belum menjadi bagian dari SOP pelayanan
<b>Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi</b>			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Koordinasi antar OPD dan stakeholder belum sistematis	Kemitraan antar pemangku kepentingan berjalan aktif dan reguler	Masih lemahnya forum koordinasi dan jejaring antar OPD

0

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Infrastruktur TI di kelurahan dan kecamatan masih terbatas	Tersedianya perangkat TI dan sistem informasi di semua unit layanan	Fasilitas TI masih tertinggal di banyak unit layanan
<b>Kemitraan Riset dan Inovasi;</b>			
Peningkatan difusi inovasi;	Inovasi layanan belum terstandar dan tidak terdokumentasi	Setiap inovasi layanan terdokumentasi dan direplikasi	Inovasi layanan tidak terdokumentasi dan tidak ditiru
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Kepedulian terhadap standar layanan global masih rendah	Adopsi prinsip pelayanan global menjadi bagian kebijakan lokal	Kurangnya pembela jaran dari standar internasional
Penguatan kerjasama internasional	Minimnya kerja sama internasional dalam layanan publik	Terciptanya kolaborasi luar negeri untuk peningkatan kualitas layanan	Minimnya kerja sama strategis dengan mitra internasional
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi kebijakan berbasis riset belum dilakukan secara luas	Kebijakan berbasis riset didiseminasi ke seluruh OPD	Riset belum menjadi dasar pembuatan kebijakan layanan
<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>			
Promosi dan kampanye inovasi;	Promosi terhadap inovasi layanan tidak berjalan konsisten	Promosi inovasi dilakukan melalui media dan event tahunan	Kegiatan promosi terbatas dan tidak strategis
Apresiasi prestasi inovasi	Apresiasi atas inovator pelayanan publik belum menjadi agenda tetap	Penghargaan terhadap inovasi publik diberikan secara rutin	Tidak ada sistem penghargaan formal bagi inovator layanan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Startup layanan publik sangat terbatas	Startup digital layanan publik tumbuh secara berkelanjutan	Kehadiran startup belum didukung oleh kebijakan dan inkubasi

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Pengetahuan kelembagaan dan manajemen layanan belum terdokumentasi baik	Sistem manajemen layanan terdokumentasi dan terbuka untuk pembelajaran	Dokumentasi kelembagaan tidak menjadi prioritas
<b>Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah</b>			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Riset kebijakan layanan belum menyasar kebutuhan masyarakat	Riset diarahkan pada kebutuhan konkret layanan masyarakat	Kebijakan tidak berbasis kebutuhan aktual masyarakat
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terbentuk klaster layanan inovatif antarsektor	Klaster inovatif terbentuk untuk mempercepat reformasi layanan	Tidak adanya klasterisasi layanan inovatif
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum sinkronnya kebijakan pusat dan daerah dalam digitalisasi layanan	Harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan telah berjalan	Perbedaan prioritas pusat dan daerah belum dijembatani
<b>Penyelarasan dengan perkembangan global</b>			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Kepedulian terhadap isu-isu internasional seperti SDGs, perubahan iklim, dan transformasi digital masih rendah di kalangan pemangku kepentingan daerah	Pemangku kepentingan daerah secara aktif mengintegrasikan isu global dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi	Kurangnya pemahaman dan strategi operasional dalam mengadopsi isu global ke dalam kebijakan daerah



Penguatan kerjasama internasional	Kerja sama internasional dalam pengembangan riset dan inovasi belum menjadi prioritas dan belum banyak dimanfaatkan secara strategis	Terbentuknya kolaborasi internasional yang produktif untuk penguatan kapasitas lokal, transfer teknologi, dan perluasan jaringan inovasi global	Belum adanya mekanisme yang mendorong dan memfasilitasi kemitraan dengan lembaga riset atau jaringan internasional
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Analisa Tim, 2025

## BAB V

### STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi riset dan inovasi daerah didasarkan pada kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Blitar. Strategi ini selaras dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Strategi ini berupa memperkuat serta mengidentifikasi kebutuhan agar ekosistem riset dan inovasi daerah menjadi lebih baik. Secara lengkap, strategi riset dan inovasi IPTEK daerah Kota Blitar dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1 Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Pada bagian Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Kota Blitar, memiliki beberapa tantangan yang perlu diperbaiki dan tingkatkan. Terutama pada Anggaran Riset dan Inovasi serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dinilai masih kurang baik. Ketiadaan Pos pembiayaan yang jelas untuk kegiatan riset dan Inovasi, menjadi faktor utama kesenjangan pada persoalan ini. Maka, penyediaan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk riset dan inovasi perlu untuk terus diupayakan.

Sementara itu, belum optimalnya sistem perlindungan hak cipta dan paten hasil inovasi lokal menjadi tantangan dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, ketersediaan perlindungan hukum dan dukungan komersialisasi hasil riset dan Kekayaan Intelektual perlu untuk terus didorong dan ditingkatkan.

Selain pada, 2 (dua) aspek yang menjadi tantangan pada bagian Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Kota Blitar sebelumnya. Tantangan pada bagian ini juga berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur riset yang memadai, pengelolaan basis data yang belum optimal dan belum adanya kebijakan Riset dan Inovasi yang progresif. Berikut merupakan, Gambaran strategi Kebijakan dan peningkatan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kota Blitar.



**Tabel 5. 1** Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

NO	ASPEK	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Reformasi Kebijakan IPTEK Daerah	Belum adanya kebijakan reformasi kebijakan yang progresif.	Penyusunan dan Penerbitan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah 2025 – 2029.
2	Pengembangan Infrastruktur dasar IPTEK	Fasilitas fisik dan laboratorium riset yang belum tersebar merata dan belum mendukung kebutuhan inovasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas riset dan inovasi yang mendukung pengembangan Riset dan Inovasi Daerah dan Produk Unggulan Daerah (PUD).</li> <li>2. Pembangunan Pusat – pusat riset studi</li> </ol>
3	Penataan Basis Data IPTEK	Belum adanya sistem informasi data riset yang terstandar dan mudah diakses.	Penyediaan dan/atau peningkatan Sistem Informasi data riset dan inovasi yang terintegrasi dan dapat diakses public yang berbasis pada data eksisting.
4	Anggaran Riset dan Inovasi	Ketiadaan pos pembiayaan yang jelas untuk kegiatan riset dan inovasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Anggaran khusus dan berkelanjutan untuk Riset dan Inovasi.</li> <li>2. Penyediaan anggaran untuk insentif bagi peneliti.</li> </ol>
5	Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Belum optimalnya sistem perlindungan hak cipta dan paten hasil inovasi lokal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan laboratorium dan/atau studio hak kekayaan intelektual di daerah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada di BAPPERIDA atau fasilitas kelitbangam lainnya.</li> <li>2. Pengajuan produk ketilbangam yang belum mendapat HAKI.</li> </ol>

Sumber: Analisa Tim, 2025

## **5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah**

Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di daerah berkaitan dengan kolaborasi penyelenggara riset dan inovasi yaitu BAPPERIDA dengan perangkat daerah di Kota Blitar. Kolaborasi ini membutuhkan peningkatan intensitas terutama pada keterlibatan dalam riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh BAPPERIDA. Strategi ini misalnya dengan peneliti campuran (*blended researcher*) bahwa perangkat daerah dimasukkan dalam setiap proses riset dan inovasi. Hal ini memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas riset dan inovasi yang lebih implementatif. Berikut merupakan, Gambaran strategi dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kota Blitar.

**Tabel 5. 2** Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

NO	ASPEK	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan.	Belum terbangunnya kolaborasi antar pihak secara sistematis, minimnya forum integratif riset.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemetaan keunggulan dan potensi kolaborasi riset dan inovasi sesuai dengan permasalahan daerah dan produk unggulan daerah.</li><li>2. Skema/jaminan benefit untuk lembaga pelaku riset yang berkolaborasi.</li><li>3. Penguatan fungsi kelembagaan BRIDA Kota sebagai orkestrator riset dan inovasi (fungsi assessment terhadap kegiatan riset dan inovasi OPD).</li><li>4. Penguatan kolaborasi BRIDA Kota dengan perguruan tinggi maupun perusahaan/bisnis.</li><li>5. Evaluasi terhadap efektifitas dan dampak kolaborasi yang sudah dilaksanakan.</li></ol>



2	Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi IPTEK di Daerah	Sarana riset belum sesuai kebutuhan dan tidak tersebar merata antar lembaga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi terintegrasi hasil riset dan inovasi yang mudah diakses Masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan fasilitasi akses terhadap perangkat lunak (software/aplikasi) untuk analisis riset dan inovasi.</li> <li>3. Perpustakaan digital, <i>Co-working space</i> dan pusat pelayanan analisis data.</li> </ol>
3	Kelembagaan dan SDM.	Minimnya dana inkubasi, belum ada model pelatihan dan pembinaan berkelanjutan berbasis kebutuhan UMKM.	Peningkatan dukungan pendanaan awal untuk inovator, dan program pembinaan pasca produksi yang aplikatif hingga pemasaran.

Sumber : Analisa Tim, 2025

### 5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Strategi peningkatan kemitraan riset dan inovasi daerah adalah kunci untuk memperkuat ekosistem inovasi lokal, mempercepat pemecahan masalah spesifik daerah, serta meningkatkan daya saing regional. Pada bagian ini, tantangan yang dihadapi Kota Blitar adalah belum dimanfaatkannya secara optimal hasil riset dan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme maupun insentif pemanfaatan hasil riset oleh stakeholder lokal. Berikut merupakan, Gambaran strategi dalam peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah.

**Tabel 5. 3** Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar

NO	ASPEK	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Penerapan dan Penyebaran Inovasi.	Rendahnya infrastruktur komunikasi dan kurangnya dukungan program untuk penyebaran hasil inovasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan media sosial dan media Massa.</li> <li>2. Pelibatan <i>public figure</i> dalam difusi hasil riset dan inovasi.</li> </ol>



2	Pemanfaatan Hasil Riset.	Belum tersedia mekanisme insentif pemanfaatan hasil riset oleh stakeholder lokal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi terbuka diseminasi hasil riset dan inovasi melalui SIDa Kota Blitar sehingga dapat diakses secara luas oleh perangkat daerah dan Masyarakat</li> <li>2. Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi melalui evaluasi dan monitoring penggunaan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah.</li> </ol>
3	Program Khusus Penyebaran.	Minimnya regulasi dan panduan teknis implementasi hasil riset di lapangan.	
4	Kemitraan dengan Stakeholder.	Belum ada struktur kelembagaan khusus yang mengelola dan memfasilitasi kemitraan riset secara profesional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kemitraan yang sudah terjalin dan dampaknya.</li> <li>2. Pemetaan potensi dan kebutuhan riset dan inovasi dalam rangka pengembangan jejaring kerjasama riset dan inovasi antar stakeholder (pentahelix).</li> <li>3. Pemetaan potensi kebutuhan kemitraan yang diinisiasi oleh badan usaha (BUMD, Swasta) untuk pengembangan sektor unggulan daerah.</li> <li>4. Jaminan benefit untuk mitra riset dan inovasi.</li> </ol>

Sumber : Analisa Tim, 2025

#### 5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya menjadi salah satu aspek dalam mempertahankan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Budaya masyarakat yang berkembang dan terbuka dengan ilmu pengetahuan akan memastikan ekosistem riset dan



inovasi terus eksis dan berkembang di daerah. Ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Oleh karena itu, budaya riset dan inovasi di daerah perlu terus digalakkan dan Kota Blitar telah memulai budaya ini dengan baik melalui berbagai kegiatan kompetisi, pameran inovasi, dan sebagainya. Berikut merupakan, Gambaran strategi dalam peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah.

**Tabel 5. 4** Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

NO	ASPEK	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Promosi dan Kampanye riset dan Inovasi daerah	Kurangnya promosi kreatif dan komunikasi publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan media digital dan media Massa.
2	Apresiasi Prestasi riset dan Inovasi daerah	Ketiadaan sistem apresiasi yang sistematis dan terukur terhadap pelaku inovasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan apresiasi untuk para periset dan inventor</li><li>2. Fasilitasi keberlanjutan inovasi</li></ol>
3	Pengembangan Perusahaan Pemula berbasis riset	Minimnya inkubasi dan pembinaan bagi startup berbasis riset secara formal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi fungsi inkubator bisnis.</li><li>2. Peningkatan peran kabupaten/kota dalam pengembangan inkubator bisnis.</li><li>3. Peningkatan peran stakeholder non pemerintah dalam penyediaan inkubasi bisnis.</li></ol>

4	Pencatatan dan Perlindungan Pengetahuan	Belum ada sistem yang menjamin perlindungan dan pengembangan berkelanjutan terhadap pengetahuan lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kedulian tentang KI kepada masyarakat .</li> <li>2. Inventarisasi dan penyusunan basis data KI (pengetahuan dan teknologi) masyarakat terintegrasi.</li> <li>3. Penguatan kolaborasi fasilitasi pengembangan KI (pengetahuan dan teknologi) Masyarakat.</li> <li>4. Peningkatan kolaborasi pusat inovasi dan sentra KI dalam upaya inventarisasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual Masyarakat.</li> </ol>
---	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Analisa Tim, 2025

### 5.5 Strategi penguatan keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan riset dan inovasi yang baik adalah ketika sejalan dan selaras dengan potensi, produk unggulan, dan permasalahan di daerah. Hal ini karena riset dan inovasi bertujuan memberikan solusi yang tepat sasaran sesuai kondisi yang ada. Berikut merupakan, Gambaran strategi dalam peningkatan penguatan keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah.

**Tabel 5. 5** Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

NO	ASPEK	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Pengembangan Riset dan Inovasi	Kegiatan riset belum diprioritaskan secara sistematis; minim sosialisasi dan pemetaan kebutuhan nyata masyarakat	Penetapan <i>roadmap</i> riset dan inovasi yang disusun partisipatif, peningkatan forum diskusi dan edukasi masyarakat, serta penambahan anggaran dan keberpihakan pada masyarakat.

l

2	Pengembangan Klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum ada struktur klaster inovasi formal dan kelembagaan pendukung yang kuat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah.</li> <li>2. Inisiasi dan pengembangan riset dan inovasi dengan menindak lanjuti analisis dan peta produk unggulan daerah.</li> <li>3. Inisiasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.</li> </ol>
3	Keselarasan implementasi Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah	Keselarasan kebijakan masih perlu ditingkatkan dan diperkuat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkomunikasikan kebutuhan arah kebijakan riset dan inovasi pusat dan daerah melalui berbagai saluran.</li> <li>2. Antisipasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah.</li> </ol>
4	Kendala Utama Riset	Tidak tersedia dukungan regulasi atau kebijakan pendampingan berkelanjutan untuk hasil riset	Pembentukan lembaga khusus seperti Klinik IKM, dukungan pemerintah yang kuat, penyamaan persepsi antar elemen, dan penguatan regulasi yang mendukung riset.
5	Tantangan Membangun Klaster Inovasi	Keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat serta belum adanya peta jalan inovasi lokal	Pemetaan klaster pengembangan inovasi produk unggulan daerah.

Sumber : Analisa Tim, 2025

### 5.6 Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan perkembangan Global

Riset dan inovasi daerah butuh mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkembang secara global. Biasanya, riset dan inovasi di negara maju lebih dulu mengembangkan inovasi dan ilmu pengetahuan. Maka, BAPPERIDA dapat memasukkan persyaratan atau aspek kebaruan inovasi dan ilmu pengetahuan dari dunia internasional ke dalam berbagai kegiatan riset dan inovasi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan INOTEK dan/atau riset dan inovasi yang diselenggarakan. Berikut merupakan, Gambaran strategi dalam



penyelarasan riset dan inovasi daerah dengan perkembangan global.

**Tabel 5. 6** Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan perkembangan Global

NO	ASPEK	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Relevansi Isu Internasional	Kurangnya respons kebijakan lokal terhadap isu global yang berdampak langsung	Pemetaan tema dan penerbitan riset sesuai dengan isu global seperti perubahan iklim, energi terbarukan yang perlu menjadi prioritas riset inovasi daerah.
2	Penguatan Kerjasama Internasional	Belumada kerangka kelembagaan dan pendanaan untuk mendukung kerjasama internasional	Melalui Pemetaan potensi kerjasama internasional dan Inisiasi penjajakan kerjasama riset internasional kolaborasi BRIN dan perguruan tinggi.
3	Dampak Kerjasama Internasional	Minimnya kolaborasi strategis dengan lembaga global dan akses pada sumber daya teknologi	Optimalisasi kolaborasi lintas sektor termasuk transfer teknologi dan investasi asing dalam inovasi daerah.
4	Arah Penyesuaian Global	Tidak tersedianya roadmap globalisasi inovasi daerah serta kurangnya kapasitas SDM dalam menjawab tantangan global.	Penyusunan Rencana Aksi penyelarasan dengan tren global melalui forum diskusi, pelatihan SDM, sosialisasi dan skema kemitraan global yang konkret.

Sumber : Analisa Tim, 2025

### 5.7 Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5.7 Strategi dan Program Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Indikator Utama	Tahun					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029		
Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota (RIPPARKOT)	Dokumen RIPPARKOT	✓					Tersedianya Pedoman Pembangunan Pariwisata Daerah	Urusan Pariwisata Daerah
Kajian Tata Kelola Pariwisata berbasis Komunitas	Rencana Induk Destinasi Pariwisata Kota (RIDPK)	Dokumen RIDPK		✓				Tersedianya pedoman pembangunan destinasi wisata Kota Blitar	Urusan Pariwisata Daerah
Kajian kampung wisata dan objek wisata baru	Kajian Tata Kelola Tata Kelola			✓				Dokumen Standarisasi Tata Kelola	Urusan Pariwisata daerah
	Jumlah kampung wisata aktif dan objek baru dibuka				✓			Diversifikasi destinasi dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Pariwisata daerah
Kajian Pasar ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi	✓	✓	✓				Penguatan ekosistem	Urusan Pariwisata

	Kreatif yang terfasilitasi				ekonomi kreatif berbasis wisata	daerah dan perekonomian
Kajian Masterplan Makam Bung Karno sebagai Wisata berskala internasional	Dokumen Masterplan Makam Bung Karno	✓	✓	✓	Peningkatan Kontribusi Pertumbuhan ekonomi Destinasi Wisata Makam BungKarno	Urusan Pariwisata Daerah
Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Blitar	Penetapan PUD Kota Blitar	✓			Penetapan PUD Kota Blitar	Urusan Perekonominian, UKM, Perdagangan dan Industri
Peta Jalan dan Standarisasi PUD	Dokumen Peta Jalan dan Standarisasi	✓			Peningkatan Standar PUD	Urusan Perekonominian, UKM, Perdagangan dan Industri
Kajian Pengembangan Sentra dan Produksi PUD	Dokumen Kajian	✓	✓	✓	PUD sebagai Citra Daerah dan Penggerak Perekonomian	Urusan Perekonominian, UKM, Perdagangan dan Industri



Kajian Strategi Inovasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM)	Dokumen Kajian	✓	Peningkatan Jumlah Inovasi UKM dan IKM	Urusan Perekonomian, UKM, Perdagangan dan Industri
Pemanfaatan Big Data dalam Pengembangan UKM dan IKM	Sinkronisasi Big Data UKM dan IKM	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Peningkatan Produktivitas UKM dan IKM	Urusan Perekonomian, UKM, Perdagangan dan Industri
Digitalisasi Basis Data UKM dan IKM mendukung Smart City	Data Digital UKM dan IKM	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Kemudahan Akses dan Ketersediaan Data UKM dan IKM	Urusan Perekonomian, UKM, Perdagangan dan Industri
Kajian pengembangan dan Tata Kelola Kelembagaan Sentra UKM dan IKM	Rencana Pengembangan Tata Kelola	✓	Pengelolaan Sentra UKM dan IKM yang Profesional dan Akuntabel	Urusan Perekonomian, UKM, Perdagangan dan Industri
Peta Jalan UKM dan IKM di Era Ekonomi 5.0	Dokumen Peta Jalan	✓ ✓	Peningkatan Kontribusi dan peran UKM dan IKM terhadap Perekonomian Daerah	Urusan Perekonomian, UKM, Perdagangan dan Industri

### 5.8 Strategi Peningkatan Pelayanan Publik

Tabel 5.8 Strategi dan Program Peningkatan Pelayanan Publik

Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Indikator Utama	Tahun					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029		
Pelayanan Publik	Penyusunan Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Tersedianya Layanan SPBE	✓	✓	✓			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi
Evaluasi dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPBE	✓	✓	✓				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi
Penyusunan SOP SPBE	Dokumen SOP	✓	✓	✓				Dokumen SOP SPBE	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi
Percepatan perizinan berbasis Incentif dan Disincentif	Kebijakan Percepatan InDis	✓	✓	✓				Percepatan perizinan	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi
Evaluasi dan Perencanaan Perizinan berbasis Incentif dan Disincentif	Dokumen Evaluasi	✓	✓	✓				Peningkatan Percepatan Perizinan	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi

Penyusunan SOP Perizinan berbasis Incentif dan Disincentif	Dokumen SOP	✓	✓	✓	Peningkatan Percepatan Perizinan	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi
Pengembangan Blitar Smart Services	Tersedianya Blitar Smart Services				Optimalisasi Pelayanan Publik	Urusan Perencanaan Daerah, Perizinan dan Investasi
Pengembangan Pusat Perizinan dan Layanan Jasa melalui Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dan Blitar Smart Services	Peningkatan Skala Pelayanan dan Kepuasan Publik				Optimalisasi Pelayanan Publik	Urusan Perencanaan Daerah, Komunikasi, Kependudukan dan Investasi

Sumber : Analisa Tim, 2025

## 5.9 Strategi Penanganan Persampahan dan Degradasi Lingkungan

Tabel 5.9 Strategi dan Program Penyelesaian Permasalahan Persampahan dan Degradasi Lingkungan

Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Indikator Utama	Tahun					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029		
Penanganan Degradas Lingkungan	Penyusunan Rencana Mitigasi Perubahan Iklim melalui Identifikasi Carbon Stock / Carbon Storage	Rencana Mitigasi Perubahan Iklim	✓	✓				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Urusan perencanaan daerah dan lingkungan
Rencana Aksi Transisi Ekonomi Hijau	Rencana Pelaksanaan Ekonomi Hijau	✓	✓					Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Urusan perencanaan daerah, perkeconomian dan lingkungan
Kajian Pengelolaan Sampah Terpadu	Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu							Strategi Efisien Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	Urusan perencanaan daerah dan lingkungan
Inovasi Sistem Digitalisasi Bank Sampah di Kota Blitar	Jumlah Bank Sampah Aktif dan Terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓		Peningkatan Partisipasi dan Daur Ulang Sampah	Urusan Inovasi daerah dan lingkungan

Kebijakan Incentif dan Disincentif Pengelolaan Sampah di Sektor Swasta	Peraturan dan Skema Incentif yang Diterbitkan	✓	✓	✓	✓	✓	Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pengurangan Sampah	Urusan perencanaan Daerah dan Hukum
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------------------	-------------------------------------

Sumber : Analisa Tim, 2025

## 5.10 Strategi Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Tabel 5. 10 Strategi dan Program Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Indikator Utama	Tahun					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029		
Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia	Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	✓	✓				Penurunan Angka Kemiskinan	Urusan Tenaga Kerja, Statistik dan Sosial
	Analisis karakteristik kemiskinan berdasarkan kewilayahan.	Peta Karakteristik Kemiskinan berdasarkan Wilayah	✓	✓				Efektifitas Program pengentasan Kemiskinan	Urusan Tenaga Kerja, Statistik dan Sosial
	Evaluasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Perlindungan	✓	✓	✓	✓	✓	Penurunan Pengangguran, peningkatan produktivitas dan penyediaan lapangan kerja.	Urusan Tenaga Kerja

	Kerja.							
Analisa Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓	Penurunan Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	Urusan Tenaga Kerja
Analisis karakteristik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	✓	✓	✓	✓	✓	Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Urusan Tenaga Kerja
Rencana Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	MoU Kemitraan/Kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓	Peningkatan Kemampuan Belanja Daerah	Urusan Perencanaan Daerah, Investasi dan Pekerjaan Umum
Masterplan dan Revitalisasi Sarana Kesehatan, Olahraga, Pertanian dan Pasar	Masterplan	✓	✓	✓	✓	✓	Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Olahraga, Pertanian dan Pasar	Urusan Perencanaan Daerah, Investasi, Olahraga, Pertanian, Perdagangan, Pekerjaan Umum

Rencana Induk Sistem Air Limbah	Dokumen Rencana Induk	✓	✓	Peningkatan Standar Pengelolaan Air Limbah	Urusan Perencanaan Daerah, Lingkungan dan Pekerjaan Umum
Peningkatan Drainase perkotaan, Sungai, Irigasi dan Sanitasi	Jumlah Drainase, Irigasi dan Sanitasi yang di revitalisasi	✓	✓	Peningkatan Kualitas Fasilitas/ Sarana	Urusan Perencanaan Daerah, Lingkungan dan Pekerjaan Umum
Rencana Induk Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen Rencana Induk	✓	✓	Dokumen Induk/Panduan	Urusan Perencanaan Daerah, Lingkungan dan Pekerjaan Umum
Penyusunan Peta Masalah dan Prioritas Intervensi penanganan Stunting berdasarkan data e-PPGBM.	Peta Masalah dan Prioritas Intervensi	✓	✓	Tersedianya Peta Masalah dan Prioritas Intervensi	Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Evaluasi Kebijakan Penanganan Stunting	Angka Prevalensi Stunting	✓	✓	Penurunan Angka Stunting	Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi kebijakan dan Kurikulum Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Pelaksanaan SOTH	✓	✓	✓	✓	✓	Peningkatan kualitas dan Kurikulum SOTH yang berkelanjutan	Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kajian Standarisasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Peningkatan kualitas hidup keluarga	✓	✓	✓	✓	✓	perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan	Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Evaluasi dan Training of Trainers (TOT) Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Literasi TPK	✓	✓	✓	✓	✓	Peningkatan Literasi dan Kinerja TPK	Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Analisis Potensi dan Tantangan Sekolah Rakyat dalam pemerataan Pendidikan berkualitas	Dokumen Kajian termasuk pada Peta Masalah dan Prioritas Intervensi pengembangan Sekolah Rakyat	✓	✓				Kebijakan dan/ atau regulasi pendukung pengembangan Sekolah Rakyat	Urusan Perencanaan Daerah, Sosial dan Pendidikan Berencana

Inovasi Sistem Beasiswa Bimbingan Belajar, Perguruan tinggi dan Sekolah Gratis untuk Putra/I Daerah.	Regulasi dan/atau Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standarisasi Sistem Beasiswa dan Sekolah Gratis	Peningkatan Kualitas Layanan dan indicator capaian kinerja program,	Urusan Perencanaan Daerah, Pendidikan
Revitalisasi Infrastruktur dan Inovasi Tata Kelola Sekolah Rakyat	Detail Engineering Design (DED) dan Dokumen Kajian	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Kelola Sekolah Rakyat	Urusan Perencanaan Daerah, Sosial, Pendidikan dan Pekerjaan Umum
Inovasi Pengembangan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	Dokumen dan Regulasi Daerah	Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	Urusan Perencanaan Daerah, Pendidikan

Inovasi Pengembangan Kurikulum pendidikan berbasis Kearifan Lokal, Kewirausahaan, Budi Pekerti dan Potensi Daerah	Dokumen dan Regulasi Pengembangan Kurikulum berbasis Kearifan Lokal, Kewirausahaan, Budi Pekerti dan Potensi Daerah	Penguatan Karakteristik dan Daya Saing Lulusan	Urusan Perencanaan Daerah, Pendidikan Lulusan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Sumber : Analisa Tim, 2025

## **BAB VI**

### **PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Proses perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas sangat penting untuk keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk pemerintah Kota Blitar, untuk menjalankan proses perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas. Kebijakan yang berkualitas didefinisikan sebagai kebijakan yang aplikatif dan dibuat berdasarkan bukti yang terkini, relevan, representatif, dan valid. Riset dan inovasi idealnya dilakukan untuk memberikan bukti ilmiah terhadap masalah pembangunan, sehingga penerapan kebijakan lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Riset dan inovasi Kota Blitar mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi, menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak, data yang relevan, dan kontribusi nyata untuk sistem pengambilan keputusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan pembuktian (science and evidence). Kegiatan riset dan inovasi idealnya juga linear dengan permasalahan utama Rencana Pembangunan Daerah di Kota Blitar.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2025 – 2045 permasalahan Kota Blitar antara lain: Rendahnya Pendidikan dan Tingginya Angka Pengangguran, Tingginya Prevalensi Stunting dan TBC, Rendahnya tingkat kesejahteraan, Rendahnya Daya Tarik sebagai wisata kebangsaan, Turunnya Investasi, Belum tersedianya data terintegrasi, Tingginya potensi kerusakan jalan Kota, Rendahnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi, Rendahnya Kemandirian Pangan dan Rendahnya Indeks Kualitas Lahan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi permasalahan dalam penjabaran Peta Jalan Riset dan Inovasi IPTEK Kota Blitar yaitu: (i) Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi, (ii) Persampahan dan Degradasi Lingkungan, (iv) Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dan (iv) Pelayanan Publik.

Rancangan RPJPD Kota Blitar tahun 2025 – 2045 memiliki visi “KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN” sehingga perumusan rencana induk dan petajalan inovasi daerah Kota Blitar mengacu pada visi tersebut. Sementara itu, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 – 2045 dijabarkan menjadi sebagai berikut:

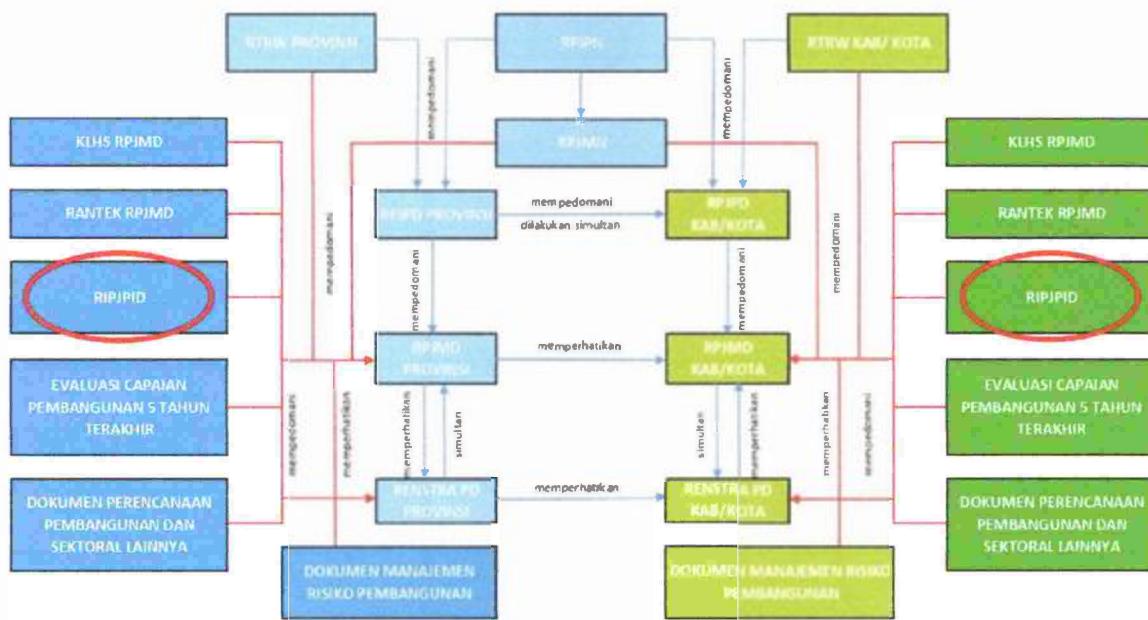


1. Tahap 1 (Pertama) tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk penguatan pondasi transformasi sebagai dasar Pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan.
2. Tahap 2 (Kedua) tahun 2030 – 2034 diarahkan untuk Akselerasi Transformasi.
3. Tahap 3 (Ketiga) tahun 2035 – 2039 diarahkan untuk penguatan transformasi yang menitikberatkan pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan Masyarakat.
4. Tahap 4 (Keempat) tahun 2040 – 2045 yaitu Kota Blitar Maju, Cerdas dan Inklusif Mendukung Indonesia Emas tahun 2045.

Selain berfokus pada permasalahan daerah dalam RPJPD Kota Blitar. RIPJPID Kota Blitar juga berfokus pada analisis terhadap kondisi eksisting sebagai salah satu bahan masukan dalam Penyusunan RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029. Secara lebih rinci, berikut merupakan Gambaran kedudukan RIPJPID terhadap RPJMD Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Gambar 6. 1 Kedudukan RIPJPID terhadap RPJMD tahun 2025 – 2029**

**Kedudukan RIPJPID Terhadap RPJMD Tahun 2025-2029**

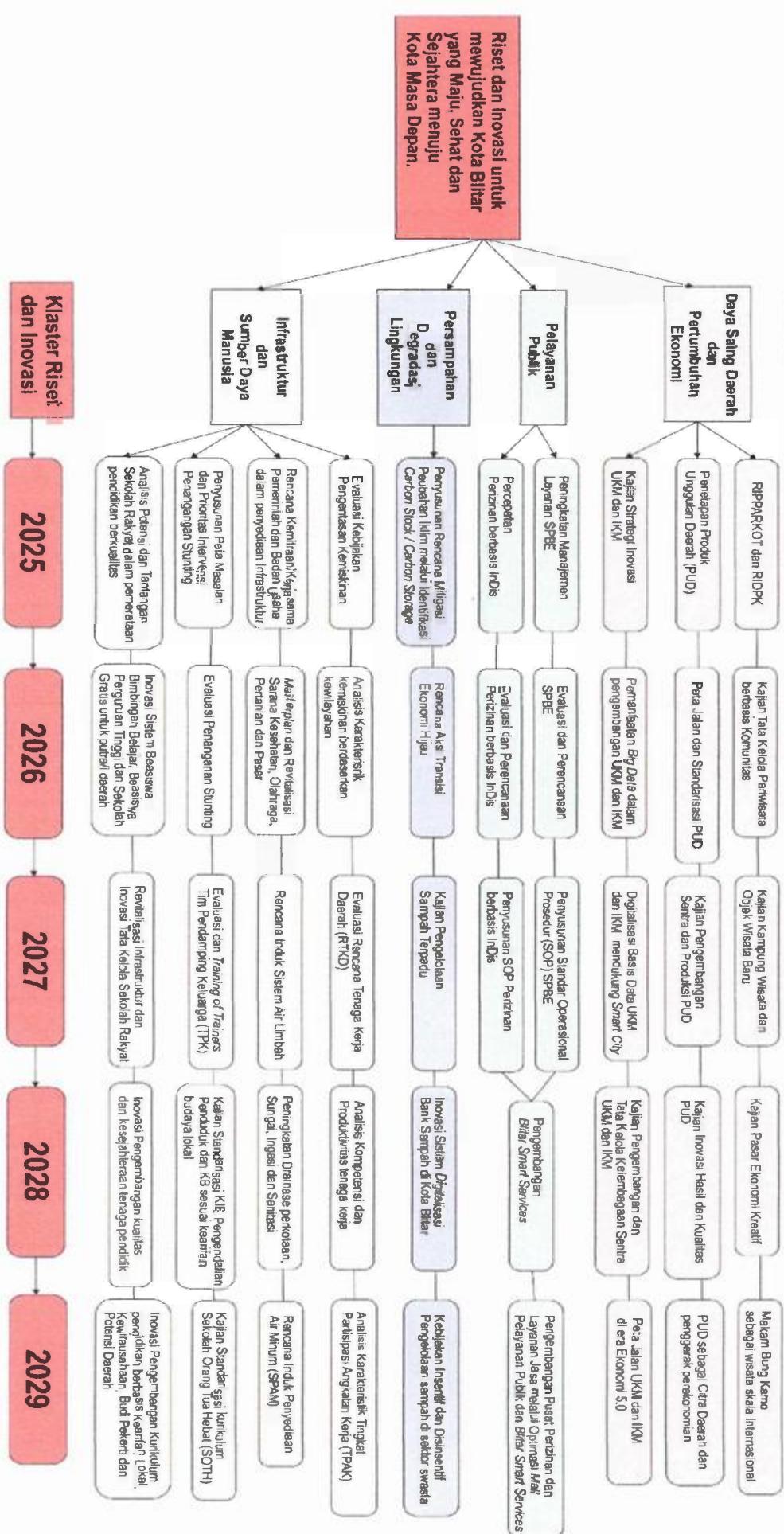


Sumber : BRIN, 2025

Kebijakan – kebijakan tersebut yang kemudian dijadikan dasar dalam Menyusun rencana induk dan petajalan riset inovasi daerah Kota Blitar tahun 2025– 2029.

**Gambar 6. 2** Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Blitar Tahun 2025-202

Fokus Utama Permasalahan  
Daerah RPJP Kota Blitar  
2025 - 2045



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah (RIPJPID) merupakan langkah strategis untuk mendorong perkembangan daerah melalui riset dan inovasi. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kegiatan riset yang aplikatif dan inovasi yang berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Dengan adanya RIPJPID yang komprehensif dan terstruktur, diharapkan dapat mengoptimalkan produk unggulan daerah yang ada serta memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Blitar kepada Tingkat yang lebih tinggi.

RIPJPID Kota Blitar dilakukan dalam kurun waktu lima tahun (2025-5029) dengan tema besar Riset dan Inovasi untuk mewujudkan Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan. Selanjutnya di perinci kedalam empat strategi yaitu Peningkatan daya saing dan Pertumbuhan Ekonomi, Penanganan Persampahan dan Degradasi Lingkungan, Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pelayanan Publik. Melalui penyusunan RIPJPID diharapkan dapat menjadi pondasi bagi sinergi antar sektor, mendorong kolaborasi multi-disiplin, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki arah yang jelas dan terukur, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Melalui RIPJPID, daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi yang berdampak luas, membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2025. *Kota Blitar dalam angka tahun 2025.* BPS: Kota Blitar
- BRIN. 2023. *Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah.* Biro Hukum dan Kerja Sama: Jakarta
- Pemerintah Kota Blitar. 2021. *Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026.* Sekretariat Daerah : Kota Blitar.
- Pemerintah Kota Blitar. 2023. *Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 tahun 2023 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 – 2026.* Sekretariat Daerah: Kota Blitar.
- Pemerintah Kota Blitar. 2024. *Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 – 2045.* Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1. Sekretariat Daerah : Kota Blitar

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008